

## **BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian. Kesimpulan tersebut disusun dalam bentuk pernyataan singkat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bagian implikasi penelitian disajikan pernyataan singkat berkaitan dengan implikasi hasil penelitian ini dari segi teoritis, praktis, regulasi, dan metodologis. Bab ini juga menjelaskan keterbatasan penelitian yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini sekaligus memberikan peluang untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini juga dilengkapi dengan saran yang menyajikan masukan peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu khususnya keterbatasan penelitian ini dan ditujukan kepada pihak lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini.

### **A. Kesimpulan**

Tujuan utama penelitian ini adalah menguji peran Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai mediasi yang dimediasi oleh Risiko Kredit atas pengaruh Komisaris Independen dan Direktur Wanita terhadap Kinerja Keuangan BPR. Penelitian ini didasari oleh fenomena penurunan kinerja keuangan yang terjadi secara terus menerus pada BPR akibat penerapan tata kelola yang tidak memadai antara tahun 2012 sampai dengan 2017 walaupun pada tahun 2015 OJK telah mengeluarkan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR serta masalah kesesuaian pendidikan BPR khususnya pada tingkatan Direksi dan Dewan Komisaris. Dari hasil regresi bertahap terhadap 433 sampel yang diambil

menggunakan metode *purposive sampling* dari BPR di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR. Berdasarkan temuan tersebut, secara sepintas aturan POJK tentang Tata Kelola BPR yang mewajibkan adanya Komisaris Independen hanya bagi BPR dengan modal inti  $\geq$  Rp50 miliar sudah tepat. Kemungkinan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR, namun ada faktor lain yang menjadi perantara (mediator).
2. Direktur Wanita tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR. Hasil tersebut secara sepintas sesuai dengan aturan POJK tentang Tata Kelola BPR yang tidak mengatur tentang Direktur Wanita bagi BPR. Sebagaimana Komisaris Independen, kemungkinan Direktur Wanita tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR, namun ada faktor lain yang menjadi perantara (mediator).
3. Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan BPR. Hasil tersebut menunjukkan Risiko Kredit adalah merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR (prediktor utama kondisi kinerja keuangan) sebagaimana salah satu fungsi dan operasional utama BPR adalah menyalurkan kredit. Risiko Kredit juga mungkin merupakan mediator pengaruh faktor lain terhadap Kinerja Keuangan BPR.

4. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Risiko Kredit. Hasil pengujian tersebut menunjukkan Risiko Kredit mempunyai indikasi yang kuat menjadi mediator pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan BPR.
5. Direktur Wanita tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit BPR. Hasil pengujian tersebut menunjukkan perlu dicari faktor lain yang menjadi mediator atau perantara antara Direktur Wanita dengan Risiko Kredit. Hasil ini juga membuktikan bahwa pemecahan masalah khusus yang terjadi pada penerapan struktur tata kelola.
6. Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Keuangan BPR. Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan BPR harus dimediasi oleh faktor lain.
7. Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Risiko Kredit. Temuan tersebut selaras dengan pernyataan bahwa Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai sumber daya manusia pada tingkat strategik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada fungsi manajemen dan juga fungsi pengawasan menurunkan risiko perusahaan. Hasil pengujian tersebut menguatkan dugaan bahwa pengaruh Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan harus dimediasi oleh Risiko Kredit.

8. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris. Struktur tata kelola dalam hal ini independensi Dewan Komisaris mendukung dan meningkatkan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang strategik. Kebijakan manajemen sumber daya manusia yang strategik berhubungan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyusun strategi, menerapkan strategi, dan mengawasi pelaksanaannya. Kebijakan manajemen sumber daya manusia yang strategik yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan pemberian kredit serta memperkirakan kemampuan klien mengembalikan kredit yang diberikan. Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris diperlukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Hasil tersebut menguatkan dugaan bahwa Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris memediasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Risiko Kredit.
9. Direktur Wanita berpengaruh positif terhadap Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris. Struktur tata kelola dalam hal ini Direktur Wanita - sebagaimana independensi Dewan Komisaris - mendukung dan meningkatkan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang strategik. Hasil tersebut juga menguatkan dugaan bahwa Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris memediasi pengaruh Direktur Wanita terhadap Risiko Kredit.

10. Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris memediasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Risiko Kredit BPR. Hasil ini menunjukkan bahwa diperlukan Komisaris Independen sebagai struktur tata kelola BPR dengan modal inti < Rp50 miliar, namun harus didukung oleh unsur Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang layak (dalam hal ini adalah kesesuaian pendidikan dalam bidang ekonomi atau bisnis baik itu untuk Direksi maupun komisaris termasuk Komisaris Independen. Hasil tersebut juga memberikan bukti bahwa pemecahan masalah yang terjadi pada penerapan tata kelola yang biasanya menggunakan dasar Teori Keagenan, harus didukung dengan Teori Tata Kelola agar efektivitas penerapan struktur tata kelola dapat tercapai.

11. Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris memediasi pengaruh Direktur Wanita terhadap Risiko Kredit BPR. Hasil ini menunjukkan bahwa diperlukan Direktur Wanita sebagai struktur tata kelola BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar, namun harus didukung oleh unsur Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang layak (dalam hal ini adalah kesesuaian latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau bisnis baik itu untuk Direksi maupun komisaris termasuk Komisaris Independen. Hasil tersebut juga memberikan bukti bahwa pemecahan masalah yang terjadi pada penerapan tata kelola yang biasanya menggunakan dasar Teori Keagenan, harus didukung dengan Teori Tata Kelola agar efektivitas penerapan struktur tata kelola dapat tercapai.

12. Risiko Kredit memediasi fungsi mediasi Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan BPR. Hasil ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen sebagai unsur struktur tata kelola tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan BPR harus melewati mediator (Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris) yang bahkan juga harus dimediasi oleh mediator yang lain (Risiko Kredit).

13. Risiko Kredit memediasi fungsi mediasi Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengaruh Direktur Wanita terhadap Kinerja Keuangan BPR. Hasil ini menunjukkan bahwa Direktur Wanita sebagai unsur struktur tata kelola tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan. Pengaruh Direktur Wanita terhadap Kinerja Keuangan BPR harus melewati mediator (Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris) yang bahkan juga harus dimediasi oleh mediator yang lain (Risiko Kredit).

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan penelitian di atas, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah “diperlukan Komisaris Independen dan Direktur Wanita pada level Direksi sebagai struktur tata kelola BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar, namun harus didukung oleh unsur Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris (dalam hal ini adalah kesesuaian latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau bisnis baik itu untuk Direksi maupun komisaris termasuk Komisaris Independen)”. Pada pemecahan masalah terus menurunnya Kinerja Keuangan BPR

terkait dengan penyebab masalah dari segi penerapan tata kelola dan manajemen yang buruk tersebut, Teori Keagenan harus didukung dengan Teori Tata Kelola.

## **1. Implikasi**

### **1. Implikasi penelitian ini dari segi teori:**

- a) Penelitian memberikan wawasan lebih mendalam tentang peran penting Komisaris Independen dan Direktur Wanita dalam struktur tata kelola perusahaan melalui temuan bahwa Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris memediasi pengaruh Komisaris Independen dan Direktur Wanita terhadap Risiko Kredit. Risiko Kredit juga berfungsi sebagai pemediasi mempengaruhi mereka terhadap Kinerja Keuangan BPR.
- b) Penelitian ini memberikan tambahan bahan referensi kepada para pemerhati dan peneliti tata kelola bahwa untuk efektivitas penerapan struktur tata kelola BPR perlu adanya pengawasan independen yang dilakukan secara layak oleh Komisaris Independen dan pengelolaan oleh Direktur Wanita. Pengawasan tersebut harus didukung dengan Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris dalam bidang ekonomi atau bisnis baik itu untuk direktur maupun komisaris termasuk Komisaris Independen.
- c) Penelitian ini memberikan bukti bahwa pemecahan masalah yang terjadi pada penerapan tata kelola menggunakan dasar Teori Keagenan perlu

didukung dengan Teori Tata Kelola agar efektivitas penerapan struktur tata kelola dapat tercapai.

- d) Penelitian ini juga menambah referensi baru pada Teori Tata Kelola khususnya penggunaan indikator baru untuk Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris terkait kesesuaian latar belakang pendidikannya.

2. Implikasi dari segi praktik:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai usulan kepada OJK untuk merevisi atau menambahkan aturan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 yang terutama terkait dengan kewajiban keberadaan Komisaris Independen dan Direktur Wanita sebagai struktur tata kelola BPR dengan modal inti < Rp50 miliar. Namun keberadaan Komisaris Independen dan Direktur Wanita pada BPR tersebut harus didukung oleh unsur Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai (dalam hal ini adalah kesesuaian latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau bisnis baik itu untuk Direksi maupun komisaris termasuk Komisaris Independen). Perpaduan tersebut sangat penting agar efektivitas pengawasan dan pelaksanaan tata kelola BPR berjalan dengan semestinya.



- b) Penelitian ini sebagai saran bagi BPR dengan modal inti < Rp50 miliar tentang perlunya Komisaris Independen dan Direktur Wanita dalam struktur tata kelola BPR.
- 3. Implikasi penelitian ini dari segi metodologis adalah untuk membuktikan bahwa struktur tata kelola sering kali berpengaruh tidak secara langsung terhadap kinerja keuangan. Struktur tata kelola sering kali harus melewati mediator yang bahkan juga harus dimediasi oleh mediator yang lain dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

## **2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif BPR tentang kinerja keuangan, risiko, dan struktur tata kelola interen yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tata kelola yang dipublikasi pada web OJK, BI, dan/atau BPR yang bersangkutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- 1. Data sampel penelitian yaitu data tahun 2016 sampai dengan 2019, terdapat *time lag* antara data penelitian dengan data pada fenomena terjadinya penurunan Kinerja Keuangan BPR yaitu data tahun 2012 sampai dengan 2019. Hal tersebut disebabkan karena semenjak tahun 2015 wewenang pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK yang menyebabkan data terkait kinerja keuangan, risiko, dan struktur tata kelola interen BPR tahun 2012 sampai dengan 2015 sudah tidak ada pada situs BI namun juga belum ada di situs OJK.

2. Pada tahun 2016 dan 2017 masih sedikit BPR yang melaporkan tata kelolanya pada situs OJK maupun BPR yang bersangkutan, hal tersebut mengakibatkan BPR yang menjadi sampel pada tahun 2016 dan 2017 lebih sedikit dibanding pada tahun 2018 dan 2019.

#### **D. Saran untuk Penelitian Berikutnya**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif menggunakan data sekunder terkait struktur tata kelola BPR yang dihubungkan dengan masalah Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, saran untuk penelitian berikutnya adalah penelitian menggunakan gabungan data sekunder dan data primer melalui kuesioner atau survei langsung ke BPR khususnya untuk memperoleh data tentang kinerja keuangan, risiko, struktur tata kelola, dan unsur Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2012 sampai dengan 2015 serta melengkapi untuk data tahun 2016 dan 2017. Pada penelitian ini metode tersebut belum dapat dilakukan karena berbagai kendala termasuk pembatasan kegiatan masyarakat akibat Covid-19.